

JEJARING SOSIAL PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI HONGKONG

Ratna Farida¹⁾, Ana Zahara²⁾, Fidhia Aruni³⁾, Teuku Muzaffarsyah⁴⁾

^{1, 2, 3)}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe-Aceh-Indonesia

⁴⁾Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh-Indonesia

Corresponding Author: anazahara92@gmail.com

ABSTRACT

In the research, the relationship between the social networks of migrant domestic workers from Indonesia in Hong Kong and the accessibility of medical care and legal protection is investigated. To help others and support the struggle of BMI organizations and groups in Hong Kong, the Coalition of Indonesian Labor Organizations in Hong Kong (KOTKIHO) was founded out of concern and solidarity. Similarly, participant observations from formal and informal activities were used in this research, which also drew on field notes. In order to control risk and gain access to resources for their health and well-being, KOTKIHO strategically use their strong and weak ties, deciding within their social network who and what to discuss with reference to medical issues. Researchers suggest using social network analysis to characterize and assess the continuous dynamic social integration process. Their employers, who can also provide them with access to institutional and social resources, are carefully negotiated with regarding their rights and opportunities. Participate in online discussions and debates regarding the health policies of their native and host nations. To better comprehend the complexity and intricacy of social integration, social network analysis must be done using a mixed-methods approach due to its limitations as a relatively new tool in the field of social integration research. It also demonstrates the establishment, activation, and mobilization of migrant social networks around discourses on state-designed immigration-related health policy.

Keywords: *Migrant Workers, Social Network, HongKong KOTKIHO*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jaringan sosial pekerja migran asal Indonesia di Hong Kong dengan aksesibilitas perlindungan hukum. Kelompok pekerja migran membantu sesama, mendukung perjuangan organisasi dan kelompok BMI di Hong Kong, sehingga didirikanlah Koalisi Organisasi Buruh Indonesia di Hong Kong (KOTKIHO) atas dasar kepedulian dan solidaritas. Demikian pula observasi partisipan dari kegiatan formal dan informal digunakan dalam kegiatan ini. penelitian, yang juga mengacu pada hasil studi lapangan. Untuk mengendalikan risiko dan mendapatkan akses ke sumber daya kesehatan dan kesejahteraan mereka, KOTKIHO secara strategis menggunakan ikatan kuat dan lemah mereka, memutuskan dalam jejaring sosial mereka siapa dan apa yang harus didiskusikan dengan mengacu pada masalah medis. Untuk mengkarakterisasi dan menilai proses integrasi sosial dinamis yang berkelanjutan, peneliti menyarankan untuk menggunakan analisis jaringan sosial. Majikan mereka, yang juga dapat memberi mereka akses ke sumber daya kelembagaan dan sosial, dinegosiasikan secara hati-hati mengenai hak dan peluang mereka. Berpartisipasi dalam diskusi dan debat online mengenai kebijakan kesehatan negara asal dan tuan rumah mereka. Untuk lebih memahami kompleksitas dan kerumitan integrasi sosial, analisis jaringan sosial harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran karena keterbatasannya sebagai alat yang relatif baru di bidang penelitian integrasi sosial. Ini juga menunjukkan pembentukan, aktivasi, dan mobilisasi jaringan sosial migran seputar wacana kebijakan kesehatan terkait imigrasi yang dirancang negara.

Kata Kunci: *Pekerja Migran, Jejaring Sosial, Hongkong Kotkiho*

PENDAHULUAN

Terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia dan pemungutan gaji atau upah untuk bekerja di luar negeri mengakibatkan berbondong-bondongnya orang dengan berbagai cara pergi dan bekerja ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Natalis & Ispriyarso, 2018). Untuk itu diperlukan kerjasama antar lembaga/kementerian memberikan perlindungan bagi setiap WNI yang akan bekerja di luar negeri, agar hak asasinya terpenuhi. Perkembangan global telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang berdampak baik menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia (Istianah & Imelda, 2021).

Hong Kong adalah kota kapitalis global, memproklamirkan diri sebagai “Asia's World City” and a “poster child for world trade.” Seperti yang diamati oleh Saskia Sassen, sebuah kota global tidak hanya melibatkan pergerakan modal, tetapi juga pergerakan tenaga kerja transnasional, “keduanya kaya, yaitu tenaga kerja profesional transnasional baru, dan miskin, yaitu sebagian besar pekerja migran; dan itu adalah ruang untuk transmigrasi bentuk-bentuk budaya, untuk reteritorialisasi subkultur 'lokal'.” Dalam konteks ini, perusahaan dan pemerintah mengagungkan kapitalisme global bahkan saat mereka menghasilkan ketidaksetaraan baru. Pertanyaan penting yang diajukan Sassen adalah apakah kota global “juga merupakan ruang untuk politik baru”.

Kepolisian Hong Kong - terkait dengan citra Hong Kong tentang bentuk pemerintahan modern yang damai dan halus serta dengan stabilitas sosial yang diperlukan untuk kemakmuran ekonomi - adalah faktor kunci (Istianah & Imelda, 2021). Polisi Hong Kong lebih baik dibandingkan dengan polisi dan pemerintah yang lebih kejam dan militeristik di tempat lain: polisi militer Nepal; polisi Korea; kekerasan tentara dan polisi Filipina terhadap pengorganisir buruh dan anggota media; dan tindakan kekerasan dan represi oleh polisi dan militer Malaysia, Indonesia, dan Cina Daratan. Ketakutan akan deportasi dan penangkapan serta pelarangan pekerja dari negara tertentu jelas menghambat potensi aktivisme di antara pekerja rumah tangga asing di lokasi Asia dan Timur Tengah lainnya (Rodiyah & Irianto, 2019).

Buruh migran menjadi objek perilaku diskriminatif dari level pelaksana kebijakan hingga pengguna layanan. Layanan yang ditawarkan oleh pekerja migran khususnya di sektor domestik telah menarik minat pengguna dan telah difasilitasi oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan pengiriman dan fasilitasi TKI menghasilkan remitansi dan keuntungan devisa. Bahkan pekerja migran disebut sebagai Pahlawan Devisa di Indonesia (Piper & Rother, 2021). Di negara penerima, permasalahan buruh migran semakin meningkat karena mereka harus

beradaptasi dengan lingkungan baru, mendapat perlakuan tidak adil dari majikan, pemotongan gaji oleh agen tenaga kerja, dan perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah. Di masa pandemi, beban buruh migran semakin berat karena mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan(Lavenex & Piper, 2021).

Hong Kong, dengan penempatan tenaga kerja Indonesia tertinggi pertama di negara itu. Namun demikian, mungkin ada sisi dimana Hong Kong tidak dapat mengelola masalah tenaga kerja dan pengupahan namun Hong Kong mencoba membuat kebijakan sistem tenaga kerja, yaitu dengan memberikan akses layanan gratis untuk konsultasi bagi pekerja migran yang mengalami masalah. Berdasarkan data penempatan PMI 2019-2021(BP2MI, 2021) :

Tabel 1. Penempatan PMI Periode Tahun 2019 s/d Tahun 2021

State	2019	2020	2021
Hongkong	71.779	53.178	52.278
Taiwan	79.573	34.287	7.789
Italia	1.349	411	3.225
Singapura	19.356	4.481	3.217
Polandia	430	837	1.195
Turki	730	47	874
Saudi Arabia	7.018	1.926	747
Malaysia	79.659	14.742	563
Maldivest	292	73	449
United Emirate Arab (UEA)	578	117	437
Jepang	486	753	359

Sumber: BP2MI 2021

Jumlah Pekerja Migran Indonesia tahun 2021 berdasarkan data penempatan PMI tahun 2021 tercatat sebanyak 72.624 orang yang terdiri dari 16.809 orang PMI Formal dan 55.815 orang PMI Informal. BP2MI menyebutkan, dari data tersebut terlihat angka penempatan PMI informal melebihi 75 persen. Artinya, mayoritas TKI yang dikirim ke luar negeri adalah TKI Informal berdasarkan penempatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Penempatan PMI di Hong Kong 2019: 71.779 2020: 53.178 2021: 52.278. Jaminan tenaga kerja akan menjadi prioritas bagi negara asal (pemerintah) maupun bagi tenaga kerja migran Indonesia itu sendiri. Karena ketika kita berada dalam kehidupan sosial negara lain, kita harus bisa menyeimbangkan dan beradaptasi baik untuk keamanan diri sendiri maupun untuk kebaikan negara penerima. Hong Kong menjadi pusat tertinggi, salah satunya di Asia Pasifik dengan angka 70.840 pada tahun 2019, dengan menjadi tiga besar di antara negara tujuan lain untuk Indonesia menurut BNP2TKI.

Makalah ini menyelidiki hubungan antara jaringan migran Indonesia dan ketersediaan

sumber daya kesehatan, khususnya bagi migran perempuan di Hong Kong, mengingat semakin banyak bukti dampak negatif migrasi terhadap kesehatan dan dalam menanggapi kurangnya studi tentang peran jejaring sosial di negara tujuan. Artikel ini membahas pertanyaan penelitian khusus (RQ) berikut dengan melihat pengalaman kesehatan dan kekhawatiran KOTKIHO dan bagaimana jejaring sosial mereka bereaksi terhadap masalah kesehatan:

RQ1: Bagaimana jejaring sosial beroperasi untuk kesehatan KOTKIHO?

RQ2: Bagaimana mereka mengatur dan memanfaatkan jejaring sosial mereka sehubungan dengan kesehatan mereka?

RQ3: Jejaring sosial kesehatan apa yang tersedia untuk KOTKIHO di Hong Kong, dan apa saja potensi dan kendalanya?

Kondisi migrasi KOTKIHO secara keseluruhan dibahas dalam makalah ini, bersama dengan keadaan sosial ekonomi dan politik saat ini yang mempengaruhi bagaimana mereka menjalani kesehatan mereka. Ini diikuti dengan studi konseptual jaringan sosial migran dan bagian singkat tentang metodologi. Untuk mengatasi kesehatan mereka, KOTKIHO mengatur dan memobilisasi jaringan sosial mereka, yang dibahas di bagian hasil. Bagian diskusi menarik kesimpulan dari ini. Temuan dan implikasi penting dirangkum dalam kesimpulan.

PERSFEKTIF TEORITIK

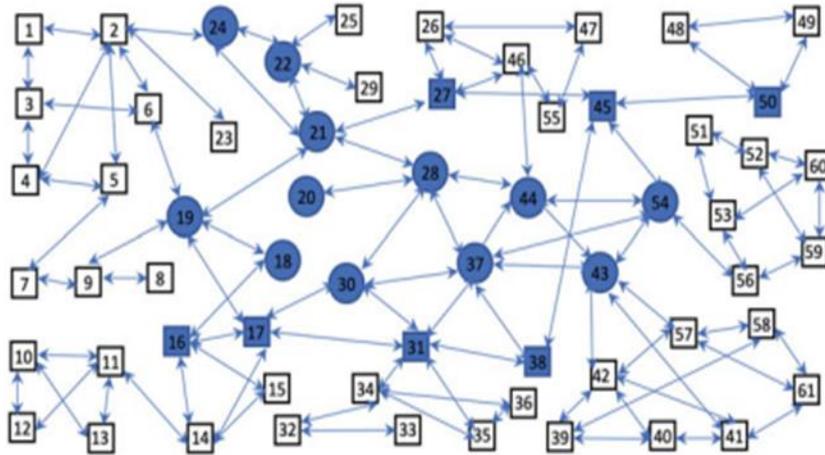
Kajian pustaka membahas Studi tentang jejaring sosial berkonsentrasi pada para pemain dan karakteristik tautan yang mengikat para aktor ini untuk memahami "jaringan kontak sosial di sekitar individu"(Sahai et al., 2022). Jejaring sosial memainkan peran kunci dalam memungkinkan mobilitas dan menurunkan bahaya yang terkait dengan migrasi, menurut studi tentang migrasi. Misalnya, kelompok imigran, terutama yang berada di Eropa, kadang-kadang menggunakan jaringan sosial informal untuk mendukung diri mereka sendiri sambil merusak sumber daya resmi yang diberikan oleh otoritas negara(Sabot et al., 2017). Modal sosial, yang didefinisikan sebagai "teman, rekan kerja, dan kontak yang lebih umum melalui siapa Anda memperoleh peluang untuk menggunakan jenis modal lain," adalah ide kunci dalam menganalisis elemen ini(Feiock et al., 2010). Definisi ini mempertimbangkan dua konsep kunci, yaitu lokasi modal sosial, atau "di mana ia berada", dan "apa yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai" tujuannya(Eiler et al., 2017). Sebagian besar penelitian menekankan pentingnya modal sosial, tata kelola jaringan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sumber daya keuangan dalam mendorong kewirausahaan migran (Ackland & Halpin, 2019). Namun, fokus dari penelitian ini adalah modal sosial, yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan

dan tertanam dalam jaringan interpersonal (Eiler et al., 2017).

"New social health experiences" diciptakan oleh jejaring sosial (Eiler et al., 2017). Karena hubungan dengan saluran formal dan informal yang tercipta di dalam jaringan sosial, promosi dan pemberian layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan dapat diakses, terutama untuk kelompok rentan. Studi kualitatif tentang jejaring sosial dan dukungan orang dewasa Korea-Amerika yang mencari informasi kesehatan, dengan fokus pada pemukim migran, telah dilakukan (Burbano et al., 2022). Secara umum, jaringan yang mempromosikan rasa kebersamaan ini juga telah meningkatkan persepsi bahwa setiap orang dalam kesehatan fisik dan mental yang baik. (Zhou et al., 2020) Namun, ada juga kekhawatiran yang nyata karena media sosial dapat menyebarkan informasi palsu tentang kondisi medis dan membahayakan pemberian layanan kesehatan dalam beberapa cara. menyatakan, misalnya, bahwa efek jaringan pada kesehatan dan kesejahteraan dapat bervariasi berdasarkan sumber daya, peluang, dan informasi yang melewatinya (Feiock et al., 2010). Berbeda dengan tautan jaringan yang lemah, yang menawarkan "sumber daya atau peluang yang ditemukan di luar kelompok yang terikat erat", hubungan jaringan yang kuat menawarkan informasi langsung dan dapat diakses, yang seringkali bermanfaat untuk memasuki pasar tenaga kerja (Zhang et al., 2022). Validitas argumen KOTKIHO ini dalam menciptakan jaringan dan koneksi untuk mengakses sumber daya dan informasi tentang kesehatan diperiksa dalam esai ini (Kurniawan & History, 2020).

METODE PENELITIAN

SNA adalah metode kuantitatif untuk memeriksa perkembangan jaringan dan koneksinya. Ini memerlukan representasi matriks dari struktur dan pola interaksi sosial yang mendasarinya, yang sering diwakili secara grafis oleh "sosiogram." Menurut perspektif SNA, hubungan sosial dan posisi sosial merupakan landasan eksistensi sosial. Ini membutuhkan pemeriksaan distribusi status dan tempat dalam jejaring sosial di dalam organisasi dan masyarakat (Eiler et al., 2017). Komponen (node) dan interaksi (tie) merupakan dua komponen yang membentuk dasar dari SNA (Feiock et al., 2010). Dalam jaringan sosial, ikatan mewakili hubungan antar node, yang mungkin berupa orang atau organisasi, dan node secara khusus adalah subjek yang relevan di dalam jaringan. Saluran komunikasi dan aliran informasi organisasi atau jaringan dapat dipetakan dan diekspos menggunakan teknik SNA (Eiler et al., 2017). Aplikasi SNA telah dibuat untuk menunjukkan interaksi sosial antara orang atau organisasi, termasuk struktur organisasi dan sistem kesehatan (Sabot et al., 2017).



Gambar.1 Jejaring sosial di Rumah KOTKIHO

Catatan kotak putih: pekerja migran pedesaan; kotak biru: pekerja perawatan perkotaan; lingkaran biru: manajer perkotaan; garis: ikatan sosial; panah: hubungan kerja langsung atau persahabatan

SNA membuatnya lebih mudah untuk menemukan node dan koneksi antara orang dan kelompok sambil menyoroti tingkat interaksi di antara mereka dalam situasi tertentu. Gambar 1 menunjukkan perkiraan jejaring sosial untuk fasilitas perawatan yang digunakan dalam studi kasus kami (informasi lebih lanjut tentang metodologi kami tersedia di bawah). Kotak-kotak pada Gambar 1 mewakili node/komponen (migran pedesaan dan penduduk perkotaan ditampilkan dalam warna berbeda), dan garis menunjukkan hubungan (ikatan) antara node. Interaksi sosial suatu kelompok atau lingkungan dapat dijelaskan dengan menggunakan grafik jaringan sosial hipotetis ini. Koneksi individu diwakili oleh panah, yang tunggal untuk koneksi satu arah atau ganda untuk koneksi dua arah. Kami berkonsentrasi pada koneksi langsung antara orang-orang serta koneksi tidak langsung yang dilakukan melalui mediator, seperti bagaimana #2 pada Gambar 1 menghubungkan koneksi tidak langsung #1 dan #23. Sementara ikatan jaringan yang lemah memberikan "sumber daya atau peluang yang tersedia di luar kelompok yang terikat erat" (Sabot et al., 2017), yang seringkali bermanfaat untuk memasuki pasar tenaga kerja, hubungan jaringan yang kuat menawarkan informasi langsung dan dapat diakses. Tetapi ikatan yang lemah tidak berarti mereka kurang dapat diandalkan atau kuat. Meskipun koneksi ini "dangkal dan kurang dalam", mereka tetap menyatukan orang-orang dari kelompok sosial yang berbeda (Kavanaugh et al., 2003), yang berdampak pada integrasi sosial dalam suatu komunitas. Misalnya, teman mungkin menghubungkan cluster jaringan bersama sehingga jaringan terus

berkembang dari waktu ke waktu. Validitas argumen KOTKIHO ini dalam menciptakan jaringan dan koneksi untuk mengakses sumber daya dan informasi tentang kesehatan diperiksa dalam esai ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan Masyarakat Sipil “KOTKIHO”

Jumlah PMI yang bekerja di Hong Kong diperkirakan akan terus bertambah, mengingat Hong Kong merupakan salah satu tujuan penempatan yang banyak diminati. Untuk bekerja di Hongkong. Prediksi Peningkatan PMI yang bekerja di Hong Kong juga disampaikan oleh Sekretaris Pekerja dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi Kwong. Menurut Law Chi Kwong, Hong Kong sangat terbantu dengan keberadaan PMI karena demografi di Hong Kong. Selain gaji dan pengalaman, keamanan dan kenyamanan kerja menjadi daya tarik tambahan untuk penempatan PMI di Hong Kong. Keluhan PMI yang diajukan di Hong Kong relatif lebih sedikit daripada di Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Yordania. Sementara itu, KJRI Hong Kong telah mengeluarkan peringatan kepada PMI di Hong Kong untuk berhati-hati dan menjauhi area protes.

KJRI juga menginstruksikan PMI untuk mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum di Hong Kong dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. PMI diimbau untuk menjaga ketenangan, tidak melakukan perilaku yang berpotensi merugikan, dan tidak memposting berbagai hal ke media sosial yang dapat menimbulkan kontroversi atau menimbulkan masalah hukum. Aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri RI dibuat, dan PMI diminta untuk mengawalinya. Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja di Hong Kong, DPR RI harus menjamin pemerintah memenuhi kewajibannya melindungi PMI. Sementara itu, KJRI Hong Kong telah mengeluarkan.

Agar UU PPMI dapat berjalan efektif, DPR RI juga harus mendorong pemerintah segera menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang penghentian dan/atau pelarangan penempatan PMI untuk pekerjaan khusus negara atau khusus di luar negeri sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU PPMI. UU PMI. DPR RI juga dapat memulai proses penetapan upaya perlindungan (PMI) di negara penempatan yang berisiko, seperti Hong Kong. Kondisi tersebut harus dipenuhi agar semua pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI dapat bekerja sama dengan baik.

Buruh migran Indonesia di Hong Kong merasa perlu membentuk komunitas sejak akhir 1990-an. kepentingan yang sesuai dalam agama, budaya, dan ekonomi. Berbagai

organisasi bermunculan untuk menanggapi hal tersebut, banyak di antaranya membentuk Koalisi Organisasi Buruh Migran Indonesia, sebuah organisasi payung, untuk memenuhi tuntutan mereka (KOTKIHO). KOTKIHO didirikan sebagai badan koordinasi pada tahun 2001 dengan misi mengatasi masalah bersama dan menawarkan program organisasi anggota. Pemrograman difokuskan pada penawaran program pendidikan dan pelatihan untuk mengakomodasi kebutuhan anggota yang berbeda. KOTKIHO berbasis di sebuah kondominium di Causeway Bay, Hong Kong, dekat sebuah taman yang cukup besar di mana para imigran Indonesia berkumpul pada hari Minggu untuk bersantai dengan teman-teman dan sesekali ikut serta atau mengamati aksi atau demonstrasi budaya Indonesia. Kelompok tersebut juga menjalankan rumah perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang terlibat dalam proses hukum; kasus-kasus ini sebagian besar terhadap majikan karena melanggar aturan ketenagakerjaan di Hong Kong. Banyak LSM filantropis, kegiatan penggalangan dana, dan sesi pelatihan komputer dan bahasa Inggris mingguan yang dijadwalkan secara rutin juga berkontribusi dalam pendanaan. Kelas pendidikan dan pelatihan diadakan pada hari Minggu dengan program berjalan dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Pemrograman reguler terdiri dari tiga kelas bahasa Inggris selama 2 jam, dan tiga kelas literasi komputer selama 2 jam. Ini terkadang diselingi dengan kelas bahasa Kanton dan diskusi tentang perencanaan program, masalah agama, hukum atau hak asasi manusia, terkadang dipimpin oleh pembicara tamu.

Sebuah keselamatan kerja, dalam kondisi maju industrialisasi, modernisasi, semua mekanisme memerlukan pengarah yang sangat dalam terkait dengan kebutuhan pekerja agar pekerja merasa nyaman. Kondisi ini sejalan dengan pembahasan studi kasus negara Hong Kong yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia bekerja. Akhir dari data yang diperoleh melalui sumber online menyebutkan sekitar 3.793 penempatan pekerja migran Indonesia bekerja di Hong Kong dengan Asia menjadi yang pertama pada tahun 2020 (BP2MI, 2021). Masalah pertama adalah pendapatan di Hong Kong merupakan hal yang menarik karena tinggi. Menurut sumber gaji yang berada di kisaran kurang lebih 15 juta-40 juta, hal ini menjadi salah satu daya tarik karena para pekerja berharap dengan bekerja di Hong Kong dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Atas dasar kepedulian dan solidaritas untuk membantu sesama dan memperkokoh perjuangan organisasi dan kelompok BMI di Hong Kong, maka dibentuklah Koalisi Organisasi Buruh Indonesia di Hong Kong (KOTKIHO) sebanyak 7 organisasi pada tanggal 20 Agustus 2000. Saat ini KOTKIHO beranggotakan 9 orang, yaitu Forum Komunikasi Mu'minat Peduli Umat (FKMPU), Yogya International Club (YIC), Amanah, Sanggar

Budaya, Majelis Taklim, Persatuan Dakwah Victoria (PDV), Al Mubarakah, Lentera Sosial Organisasi, dan Mar'atush Sholihah. Dari 9 anggota organisasi tersebut, total jumlah TKW/TKW Hong Kong yang tergabung dalam wadah KOTKIHO telah mencapai lebih dari 7.500 orang.

Jaringan Buruh Migran atau sering disebut JBM adalah kumpulan kelompok kerja dan organisasi yang mendukung perlindungan yang memadai bagi buruh migran asal Indonesia dimanapun mereka berada. Jaringan ini dijalankan oleh sebuah presidium, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda namun terkait, termasuk membuat undang-undang untuk melindungi pekerja migran, menangani kasus terkait pekerja migran, dan memperjuangkan kepentingan pekerja migran Indonesia di berbagai forum regional, termasuk ASEAN. JBM awalnya memfokuskan perjuangan pada agenda legislasi nasional, termasuk desakan DPR untuk mengubah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mulai tahun 2010. (PPTKILN). Situasi ini mendorong kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari perdagangan komponen serikat pekerja/pekerja, serikat pekerja migran, akademisi, dan LSM untuk mengawal proses legislasi dengan menyatukan diri dalam jaringan advokasi. Data daftar jaringan pekerja migran di Hongkong:

1. *Asean Employees Services Trade Union Council* (ASETUC)
2. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)
3. FSPSI Reformasi
4. *Human Rights Working Grup* (HRWG)
5. *Indonesia Migrant Workers Union* (IMWU) Belanda
6. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
7. Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI)
8. Konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesia (KSBSI)
9. Konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (KSPSI)
10. *Trade Union Rights Centre* (TURC)
11. *Union Migrant Indonesia* (UNIMIG)
12. Migrant Aids Indonesia

Perawatan Kesehatan di Jejaring Sosial

Lebih lanjut, yang utama adalah keselamatan kerja yang dinilai dari jaminan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. HongKong memberikan jaminan yang sangat rinci dalam hal menerima pekerja dari negara asing. Seperti tata cara melakukan pembelajaran, melakukan sosialisasi, dan menyediakan ruang konsultasi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang

terjadi selama bekerja disana. Menurut sumber yang didapat, salah satu partisan yang memilih bekerja di Hong Kong menilai selain mendapatkan penghasilan yang tinggi tetapi di Hong Kong tingkat kekerasannya kecil dibandingkan dengan negara lain, selain itu perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan sangat minim. juga tinggi dilindungi oleh pemerintah pernyataan itu bersumber dari(Huda et al., 2022).

Secara geografis Hong Kong berada dalam lingkup negara yang aman, kondisi ekonomi tinggi, sistem hukum berada dalam kondisi yang kuat dan stabil antara sistem ketenagakerjaan yang dilakukan dengan skema “P TO P” sehingga dapat berjalan dengan baik karena hal ini terkait dengan instansi di Hong Kong yang menegurnya (kejelasan sangat baik) (BNP2TKI, 2016). Kemudahan akses transportasi bagi TKI, fasilitas assessment di fasilitas penukaran dan pengiriman uang TKI ke negara asal hingga dapat hidup merupakan perhitungan yang cukup kuat bagi TKI di sana.

Peraturan yang berlaku di Indonesia juga mengatur bahwa setiap pekerja migran Indonesia wajib mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Ke depan, Hanif berharap BPJS Indonesia dapat bekerja sama lebih erat lagi dengan badan penyelenggara jaminan sosial di Hong Kong. Selama memiliki majikan, pekerja migran di Hong Kong berhak berobat jika sakit. Jika majikan melakukan PHK saat sakit, maka selain bisa menggugat ke kantor Depnaker, kita juga bisa menggugat ke Equal Opportunity Commission (EOC) atas diskriminasi. Jika penyakit kita dikategorikan dapat disembuhkan, maka majikan tidak berhak memutuskan kontrak kita. Perlindungan terkait jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Program Ketenagakerjaan Indonesia atau disingkat BPJS. TKI. Selain proteksi, program ini menjadi prasyarat agar PMI bisa berangkat ke negara tujuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018, jenis program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia meliputi: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 2) Jaminan Kematian (JKM). 3) Jaminan Hari Tua (JHT). Dari ketiga program tersebut, buruh migran diwajibkan mendaftar kepesertaan dalam program JKK dan JKM, sedangkan program JHT merupakan program pilihan yang dapat diikuti atas prakarsa buruh migran itu sendiri. Adapun program bagi pekerja migran adalah sebelum penempatan dengan masa perlindungan paling lama 5 bulan, dalam masa penempatan dengan jangka waktu paling lama 25 bulan, dan pasca penempatan dengan jangka waktu 1 bulan. Dengan demikian total waktu perlindungan

bagi PMI adalah 31 bulan. Jauh dari keluarga membuat PMI saling peduli. PMI biasanya memiliki organisasi serikat pekerja, asosiasi salah satu agen/PT, atau kelompok teman satu desa. Kemajuan teknologi yang pesat memudahkan mereka untuk saling bertukar informasi. PMI memiliki tempat tersendiri untuk saling bertukar informasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp group (WAG).

Ada dua jenis perlindungan sosial informal, yaitu sistem tradisional atau bantuan keluarga dan pengaturan bersama. Sistem bantuan tradisional adalah sistem kekerabatan sebagai lembaga jaminan sosial yang membantu anggota keluarga jika terjadi risiko, sedangkan sistem co-regulatory mengacu pada sistem bantuan antara tetangga dan masyarakat. Dua jenis sistem perlindungan sosial informal diketahui selama wawancara dengan pekerja migran dilakukan, yang pertama adalah donasi atau donasi antar sesama pekerja migran dan yang kedua pinjaman antar keluarga PMI. Donasi dilakukan ketika ada PMI yang terkena masalah seperti berhadapan dengan hukum dan sakit. Pinjaman antar keluarga PMI dilakukan ketika PMI harus membayar denda karena masalah hukum di negara penempatan atau membayar uang sekolah anak ketika pmi tidak dapat mengirim uang.

KESIMPULAN

KOTKIHO secara strategis memanfaatkan jejaring sosial mereka, terutama hubungan interpersonal mereka dengan kerabat, teman, dan majikan mereka di Hong Kong, untuk menjelaskan dari narasi mereka tentang masalah kesehatan dan perilaku pencarian kesehatan. Mereka menggunakan jejaring sosial mereka untuk memperoleh dan berbagi informasi kesehatan, mencari sumber daya di luar institusi resmi untuk melengkapi penyediaan layanan kesehatan, dan bersatu untuk membahas kebijakan kesehatan nasional baik dari negara asal maupun negara tuan rumah.

KOTKIHO menunjukkan keagenan mereka dalam mengendalikan risiko dan sumber daya untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka di negara tuan rumah melalui jaringan dukungan sosial mereka. Mereka memilih dalam jejaring sosial mereka siapa dan apa yang harus diungkapkan mengenai masalah kesehatan setelah diberi tahu tentang bahaya yang terlibat dalam menegosiasikan hubungan yang kuat dan lemah dalam hubungan interpersonal mereka. Mereka rajin melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja mereka, yang mungkin juga merupakan pemasok potensial sumber daya kesehatan sosial dan kelembagaan, tentang hak dan kesempatan mereka. Terakhir, KOTKIHO melibatkan jejaring sosial mereka dalam diskusi dan wacana tentang kebijakan kesehatan negara asal dan tuan rumah mereka. Dengan demikian, untuk mempertimbangkan keterbatasan kebijakan negara untuk kesehatan migran

baik di negara asal maupun negara tuan rumah, penting untuk memahami bagaimana jaringan sosial migran mengatur dan memobilisasi menuju perawatan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackland, R., & Halpin, D. R. (2019). Change or stability in the structure of interest group networks? Evidence from Scottish Public Policy Consultations. *Journal of Public Policy*, 39(2), 267–294. <https://doi.org/10.1017/S0143814X18000065>
- BP2MI. (2021). *EXECUTIVE SUMMARY D A T A P M I 2 0 2 1*.
- Burbano, D. V., Valdivieso, J. C., Izurieta, J. C., Meredith, T. C., & Ferri, D. Q. (2022). “Rethink and reset” tourism in the Galapagos Islands: Stakeholders’ views on the sustainability of tourism development. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(2). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100057>
- Eiler, B. A., Bologna, D. A., Vaughn, L. M., & Jacquez, F. (2017). A SOCIAL NETWORK APPROACH TO UNDERSTANDING COMMUNITY PARTNERSHIPS IN A NONTRADITIONAL DESTINATION FOR LATINOS. *Journal of Community Psychology*, 45(2), 178–192. <https://doi.org/10.1002/jcop.21841>
- Feiock, R. C., Lee, I. W., Park, H. J., & Lee, K. H. (2010). Collaboration networks among local elected officials: Information, commitment, and risk aversion. *Urban Affairs Review*, 46(2), 241–262. <https://doi.org/10.1177/1078087409360509>
- Huda, N., Gani, A. N., Rini, N., Rizky, T. D., & Ichsan, L. (2022). Identifying stakeholders’ perspectives on the success factors of halal tourism in the city of Makassar: a group model building approach. *International Journal of Tourism Cities*, 8(4), 883–896. <https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2021-0101>
- Istianah, I., & Imelda, J. D. (2021). Mekanisme Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Di Hongkong. *Sosio Konsepsia*, 10(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2222>
- Kurniawan, R., & History, A. (2020). Career Development System of Village Secretary after Becoming Civil Apertures (A Case Study in North Aceh District). *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 2(3), 90–93. <https://al-kindipublisher.com/index.php/jhsss/article/view/258>
- Lavenex, S., & Piper, N. (2021). Regions and global migration governance: perspectives ‘from above’, ‘from below’ and ‘from beyond.’ In *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Routledge. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1972564>
- Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 109–123. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.15784>
- Piper, N., & Rother, S. (2021). Governing regional migration from the ‘bottom-up’: a nodal approach to the role of transnational activist networks in Asia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1972569>
- Rodiyah, I., & Irianto, J. (2019). *Gender-Based Affirmative Policy for Female Migrant Workers*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-12-2018.2281775>
- Sabot, K., Wickremasinghe, D., Blanchet, K., Avan, B., & Schellenberg, J. (2017). Use of social network analysis methods to study professional advice and performance among healthcare providers: A systematic review. *Systematic Reviews*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s13643-017-0597-1>
- Sahai, H., Bailey, M., & Griffin, K. C. (2022). *Social Networks and Spatial Mobility: Evidence from Facebook in India*.
- Zhang, T., Chen, Y., Wei, M., & Dai, M. (2022). How to promote residents’ collaboration in destination governance: A framework of destination internal marketing. *Journal of Destination Marketing and Management*, 24.

<https://doi.org/10.1016/J.JDMM.2022.100710>

Zhou, K., Wang, Q., & Tang, J. (2020). Evolutionary game analysis of environmental pollution control under the government regulation. *Scientific Reports* /, 12, 474.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-04458-3>